

Analisis Pengaruh PDRB Terhadap Peningkatan Penerimaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Merangin

Nurhayati

Program Studi D IV Keuangan Daerah FEB Universitas Jambi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan PDRB dan sumber-sumber penerimaan PAD di Kabupaten Merangin dan untuk menganalisis pengaruh peningkatan PDRB terhadap peningkatan sumber-sumber penerimaan PAD di Kabupaten Merangin. Teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 2004-2013, rata-rata perkembangan peningkatan PDRB di Kabupaten Merangin tahun 2004-2013 sebesar 14.31 persen dan perkembangan sumber-sumber penerimaan PAD pada tahun 2004-2013 memiliki beberapa sumber seperti pajak daerah dengan rata-rata sebesar 23.50 persen, retribusi daerah 473.89 persen, BUMD memperoleh rata-rata sebesar 22.65 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 23.45 persen, sedangkan Pengaruh peningkatan PDRB terhadap penerimaan sumber-sumber PAD di Kabupaten Merangin adalah positif dan signifikan.

Kata kunci : PDRB, Sumber-sumber PAD

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi PDRB maka semakin besar pula potensi sumber-sumber penerimaan daerah. Dengan adanya peningkatan PDRB akan mendorong peningkatan penerimaan sumber-sumber PAD, begitu juga sebaliknya pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik, maka dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat pula sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut meningkat juga.

Pertumbuhan ekonomi merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan suatu daerah pertumbuhan Ekonomi ini dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana PDRB merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode biasanya satu tahun, dimana tingkat PDRB harga berlaku 2000 pada tahun 2004 PDRB Kabupaten Merangin sebesar Rp. 1,253,637 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp. 1,634,193 miliar di tahun 2006, 2008 sebesar Rp. 2,262,562 miliar, peningkatan PDRB ini selalu meningkat hingga tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 3,858,506 miliar.

Kabupaten Merangin sebagai salah satu daerah otonom kemampuan keuangan daerahnya dapat dilihat dari besarnya penerimaan daerah baik yang berasal dari dana perimbangan maupun sumber-sumber PAD lainnya diungkapkan dari sisi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk Kabupaten Merangin yang bersifat fluktuatif dari tahun 2004-2013. Dimana realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2004 sebesar Rp. 2.250 miliar, retribusi Rp. 4.763 miliar, laba BUMD Rp. 1.433 miliar, lain-lain PAD sebesar Rp. 9.121 miliar, tahun 2006 pajak daerah sebesar Rp. 2.929 miliar, retribusi daerah Rp. 5.669

miliar, laba BUMD Rp. 1.679 miliar, lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 10.719 miliar. Kemudian tahun 2008 pajak daerah meningkat sebesar Rp. 3.554 miliar, retribusi daerah sebesar Rp. 7.476 miliar, laba BUMD Rp. 2.220 miliar, lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 14.505 miliar, tahun 2011 pajak daerah meningkat mencapai Rp. 6.205 miliar, retribusi daerah Rp. 12.164 miliar, laba BUMD Rp. 7.319 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp. 9.710 miliar.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Negara

Keuangan negara atau publik finance merupakan bagian ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran serta pengaruh-pengaruhnya dalam perekonomian (Suparmoko, 1992, 2002).

Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan 156 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tertentu.

PDRB

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dimaksud dengan

Pendapatan Daerah adalah hal pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Pajak Daerah

Definisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 definisi retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Hasil Perusahaan Daerah

Dalam penjelasan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan atau badan yang modalnya

baik seluruhnya maupun sebagiannya, merupakan kegiatan daerah yang dipisahkan.

Lain-lain Hasil Usaha Daerah Yang Sah

Lain-lain hasil usaha daerah yang sah adalah hasil daerah yang diperoleh dari usaha perangkat Pemerintah Daerah dan bukan merupakan hasil kegiatan dan kewenangan perangkat Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2002) potensi PAD masing-masing daerah adalah berbeda sehingga memengaruhi kemandirian keuangan daerah. Beberapa variabel yang dapat memengaruhi potensi sumber-sumber PAD sebagai tolak ukur kemandirian daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Kondisi awal suatu daerah (keadaan ekonomi dan sosial suatu daerah).
- 2) Perkembangan PDRB perkapita riil
- 3) Pertumbuhan penduduk
- 4) Tingkat Inflasi
- 5) Perubahan Peraturan
- 6) Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD.
- 7) Penyesuaian tarif
- 8) Pembangunan Baru
- 9) Sumber Pendapatan Baru

Hubungan PDRB dan PAD

Hubungan antara PDRB dengan PAD merupakan hubungan secarafungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB, yaitu dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap PAD

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah di nyakini masih merupakan indicator dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto(PDRB).

Hasil Penelitian Terdahulu

Afri Hidayat (2009), Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara.

Rahmat Hidayat (2013), Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sarolangun,

Masyhuri (2010), Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan(library research) dengan analisis data sekunder.

Jenis dan Sumber Data

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin.
2. BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Merangin.
3. BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Merangin yang terkait dengan bahanditeliti.

Metode Analisis Data

P_{PDRB} = Perkembangan PDRB $P_{PDRB t}$ = Nilai PDRB tahun berjalan
 $P_{PDRB t-1}$ = Nilai PDRB tahun lalu
 $P_{PAD_{S1}}$ = Perkembangan PAD $P_{PAD_{S1t}}$ = Nilai PAD tahun berjalan $P_{PAD_{S1t-1}}$
 = Nilai PAD tahun lalu

1. Untuk menganalisis pengaruh peningkatan PDRB terhadap peningkatan sumber- sumber PAD di Kabupaten Merangin digunakan alat analisis regresi sederhana dengan formulasi yaitu :(Sumber : Ef Zuarni, 2012).

1. PAD = $\beta_0 + \beta_i PDRB + e$ Persamaan (1)
2. Pajak = $\beta_0 + \beta_i PDRB + e$ Persamaan (2)
3. Retribusi = $\beta_0 + \beta_i PDRB + e$ Persamaan (3)
4. Laba BUMD = $\beta_0 + \beta_i PDRB + e$ Persamaan (4)
5. Lain-lain PAD = $\beta_0 + \beta_i PDRB + e$ Persamaan (5)

Dimana :

Y = Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 β_0 = Konstanta
 β_i = Koefisien regresi
 e = Standar Error

PEMBAHASAN

Perkembangan PDRB dan Sumber-sumber PAD di Kabupaten Merangin
Perkembangan PDRB Kabupaten Merangin

Tabel 5.1

Perkembangan PDRB berdasarkan harga berlaku Kabupaten merangin periode 2004-2013 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	PDRB	Perkembangan (%)
2004	1.253.637	-
2005	1.462.333	16,64
2006	1.634.193	11,75
2007	1.910.086	16,88
2008	2.262.562	18,45
2009	2.750.306	21,55
2010	3.222.051	17,15
2011	3.858.506	19,75
2012	4.045.756	4,85
2013	4.212.031	4,10
Rata-rata		14,31

Sumber : BPS Kabupaten Merangin

Perkembangan Penerimaan Sumber-sumber PAD

Pajak daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan atau pendapatan asli daerah (PAD).Oleh karena itu pemerintah daerah mempunyai wewenang

untuk menyusun berbagai kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan

daerah dan dalam meningkatkan pajak daerah Kabupaten Merangin setiap tahunnya.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah Kabupaten merangin yang terhimpun dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu juga pemerintah Kabupaten Merangin terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada sub sektor retribusi daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan sumber pendapatan atau penerimaan daerah Kabupaten Merangin yang terpisahkan yang terhimpun dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin.

Tabel 5.2 Perkembangan sumber-sumber PAD Kabupaten Merangin Periode 2004-2013

Thn	P. Daerah	Perk	R. Daerah	Perk	BUMD	Perk	LYPS	Perk
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
2004	2.255.406,520	-	2,126,695,245	-	1,011,993,313	-	3,040,560,694	-
2005	2.581.541,042	14,46	2,794,000,000	31,37	1,222,192,877	20,77	5,557,578,835	82,78
2006	2.929.932,257	13,49	3,016,301,993	7,95	1,222,190,877	-0,00	7,825,756,558	40,81
2007	3.515.480,637	19,98	7,545,180,950	150,14	1,478,399,991	20,96	10,510,013,407	34,30
2008	3.554.466,151	1,10	7,476,813,832	-0,90	2,220,832,657	50,21	14,509,524,948	38,05
2009	4.163.211,925	17,12	6,879,750,024	-7,98	3,454,152,863	55,53	18,213,486,804	25,52
2010	4.540.879,223	9,07	428,963,848	-93,76	3,546,523,952	2,67	8,658,456,283	-52,46
2011	6.205,941,103	36,66	316,054,762	26,32	7,319,451,843	106,38	8,426,439,127	-2,67
2012	6.031,255,365	-2,81	363,087,703	14,88	3,648,832,317	-50,14	13,305,534,097	57,90
2013	12.210,253,513	102,44	15,575,332,789	4189,68	3,556,476,846	-2,53	11,556,431,898	-13,14
	Rata-rata	23,50	-	473,89	-	22,65	-	23,45

Sumber : DPPKAD Kabupaten Merangin

Pengaruh Peningkatan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berikut pengaruh dari peningkatan PDRB terhadap pajak daerah yang diuji dengan regresi sederhana :

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R	0.824926
R Square	0.680502
Adjusted R Square	0.640565
Standard Error	671021.9
Observations	<u>10</u>

ANOVA

	DF	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	7.67E+12	7.67E+12	17.03929	0.003308
Residual	8	3.6E+12	4.5E+11		
Total	9	1.13E+13			

	Coefficients	Standard Error	Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
Intercept	1146080	423958.4	2.703284	0.026937	168430.2	2123730

X Variable 1	0.000316	7.65E-05	4.127867	0.003308	0.000139	0.000492
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dibuat persamaan regresi pengaruh peningkatan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

Persamaan regresi

$$Y = 1146080 + 0.000316 X$$

$$= 423958.4 \quad 0,000007.65$$

$$= (2.703284) \quad (4.127867)$$

Angka dalam kurung adalah nilai t statistik

$$R^2 = 0.680502$$

$$R = 0.824926 \quad F \text{ Stat} = 17.03929$$

Pengaruh Peningkatan PDRB Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah

Untuk mengetahui pengaruh peningkatan PDRB terhadap penerimaan retribusi daerah melalui persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut :

SUMMARY OUTPUT

<i>Regression Statistics</i>						
Multiple R		0.161073				
R Square		0.025945				
Adjusted R Square		-0.09581				
Standard Error		1171641				
Observations		10				
<i>ANOVA</i>						
	<i>DF</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>	
Regression	1	2.93E+11	2.93E+11	0.213086	0.656652	
Residual	8	1.1E+13	1.37E+12			
Total	9	1.13E+13				
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper95%</i>
Intercept	2486754	529149.2	4.699533	0.001542	1266534	3706974
X Variable 1	3.75E-05	8.12E-05	0.461612	0.656652	-0.00015	0.000225

Melihat hasil perhitungan regresi sederhana diatas dapat dibuat persamaan regresi pengaruh peningkatan PDRB terhadap penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

Persamaan regresi

$$Y = 2.486.754 + 0,00003.75 X$$

$$= 529149.2 \quad 0,00008.12$$

$$= (4.6995) \quad (0.4616)$$

Angka dalam kurung adalah nilai t statistik

$$R^2 = 0.0259$$

$$R = 0.1610 \quad F \text{ Stat} = 0.213$$

Pengaruh Peningkatan PDRB Terhadap Penerimaan BUMD

Untuk lebih jelas mengenai pengaruh penigkatan PDRB terhadap penerimaan badan usaha milik daerah (BUMD) yaitu sebagai berikut :

SUMMARY OUTPUT

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0.804036
R Square	0.646474
Adjusted R Square	0.602283
Standard Error	705852
Observations	10

ANOVA					
	<i>DF</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	7.29E+12	7.29E+12	14.62915	0.005055
Residual	8	3.99E+12	4.98E+11		
Total	9	1.13E+13			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>
Intercept	1311497	417538.1	3.141023	0.013784	348652.2	2274341
X Variable 1	0.000471	0.000123	3.824807	0.005055	0.000187	0.000754

Hasil dari persamaan regresi pengaruh penigkatan PDRB terhadap penerimaan badan usaha milik daerah adalah sebagai berikut :

Persamaan regresi

$$Y = 1.311.497 + 0.000.471X$$

$$= 417530.00012$$

$$= (3.141) \quad (3.824)$$

Angka dalam kurung adalah nilai t statistik

$$R^2 = 0.6464$$

$$R = 0.8040 \quad F \text{ Stat} = 14.629$$

Pengaruh Peningkatan PDRB Terhadap Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Untuk mengetahui pengaruh penigkatan PDRB terhadap penerimaan lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Merangin mmenggunakan regresi sederhana. Estimasi

regresi dilakukan dengan menggunakan program alat analisis yang tersedia dalam Microsoft windows 7.

SUMMARY OUTPUT

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0.451844
R Square	0.204163
Adjusted R Square	0.104683
Standard Error	1059046
<u>Observations</u>	<u>10</u>

ANOVA

	<i>DF</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	2.3E+12	2.3E+122.052309		0.18987
Residual	8	8.97E+12	1.12E+12		
Total	9	1.13E+13			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>
Intercept	1506777	872616.3	1.7267350.122487		-505480	3519034
X Variable 1	0.000114	7.93E-05	1.4325880.18987		-6.9E-05	0.000296

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana pada tabel 5.6 dapat dibuat persamaan regresi pengaruh peningkatan PDRB terhadap penerimaan lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Merangin sebagai berikut :

Persamaan regresi

$$\begin{aligned}
 Y &= 15067 + 0.000114 X \\
 &= 87261 \quad 7.9300 \\
 &= (1.726) \quad (1.432)
 \end{aligned}$$

Angka dalam kurung adalah nilai t statistik

$$\begin{aligned}
 R^2 &= 0.2041 \\
 R &= 0.4518 \quad F \text{ Stat} = 2.052
 \end{aligned}$$

KESEMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Secara rata-rata perkembangan peningkatan PDRB di Kabupaten Merangin tahun 2004-2013 sebesar 14.31 persen dan perkembangan sumber-sumber penerimaan PAD pada tahun 2004-2013 memiliki beberapa sumber seperti pajak daerah dengan rata-rata sebesar 23.50 persen, retribusi daerah 473.89 persen, BUMD memperoleh rata-rata sebesar 22.65 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 23.45 persen.
2. Pengaruh peningkatan PDRB terhadap penerimaan sumber-sumber PAD di Kabupaten Merangin adalah positif dan signifikan.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Merangin diharapkan dapat mengembangkan potensi- potensi yang ada di Kabupaten Merangin secara optimal. PDRB dan sumber- sumber-sumber PAD dapat pula ditingkatkan usaha. Upaya dan strategi tersebut sangat tergantung pada kreatifitas aparatur pemerintah untuk dapat mengkoordinasikan lembaga-lembaga penghasilan PAD, seperti dengan strategi memberi bonus bagi orang/ instansi yang melampaui target yang telah ditetapkan, memberi sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh internal petugas dan atau wajib pajak.

2. Sebagai saran bagi penelitian selanjutnya adalah untuk dapat melihat peran pemerintah secara lebih komprehensif terhadap PDRB dan sumber-sumber PAD maka perlu diteliti lebih lanjut, tidak hanya dari sisi penerimaan tetapi juga dari sisi anggaran pengeluaran. Selain itu perlu dilakukan penelitian mengenai kinerja keuangan daerah dengan mengikut sertakan seluruh sektor dan komoditi yang diunggulkan pada masing-masing daerah.
3. Pemerintah harus meningkatkan PDRB dimasa yang akan datang melalui peningkatan belanja daerah terutama pada belanja langsung ke setiap sektor- sektor PDRB dan mampu mendorong peningkatan investasi baik dalam negeri maupun dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Afri Hidayat 2009, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara*. Medan.
- Apriyanti wulandari 2013, *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin*.Jambi.
- BPS (Badan Pusat Statistik) *Kabupaten Merangin* 2014.
- Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) *Kabupaten Merangin, 2014*.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, *Kabupaten merangin, 2014*.
- Eka Seprianti 2013, *analisis pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun*.Jambi. Skripsi
- Eka Rahmawati 2014, *Pengaruh PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Kabupaten Merangin*.Jambi. Skripsi
- Ef Zuarni, 2012, *Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Sarolangun*.Skripsi
- Halim 2004, *tentang pemerintah daerah*.
- Khotami 2012, *dalam skripsi, hubungan belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun*.
- Iwan Susanto 2014, *Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Kota Malang, Jatim*.
- Indonesia, *Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.
- Indra Rindu Datu K 2012, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Makassar*. Skripsi
- Laeni Najiah 2013, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap PDRB di Kota Depok*. Jakarta. Skripsi
- Masyhuri 2010, *Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin*,Jambi. Skripsi
- Rahmat Hidayat 2013, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sarolangun*, Jambi. Skripsi
- Santi Mandala 2013, *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Jumlah Penduduk Miskin*.Jambi. Skripsi
- SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Propinsi Jambi. *Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB)*.
- , Modul Ekonometrika. *Program Megister Ekonomi Pembangunan Universitas Jambi*, tidak dipublikasikan.
- , 2000 Undang-undang No 33 Tahun 2004, *tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- , 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Penerbit Erlangga. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Otonomi Daerah*.
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.